

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri merupakan aparatur pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersih berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tugas serta tanggung-jawabnya.

Dalam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah meletakkan landasan yang kokoh untuk mewujudkan Pegawai Negeri seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri sebagai salah satu kebijaksanaan dan langkah usaha penyempurnaan aparatur negara dibidang kepegawaian.

Pembinaan kepegawaian diarahkan pada makin terwujudnya kepegawaian negara yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan.

Salah satu bentuk pembinaan yang dirasakan efektif adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, yang diawali dengan pre service training atau pra jabatan sampai pada Diklat untuk menduduki jabatan atau diklat struktural. Dalam hal ini Diklat Struktural yang dimulai dari Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (DIKLAT ADUM), Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (DIKLAT SPAMA), Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (DIKLAT SPAMEN) dan Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (DIKLAT SPATI).

Demikian pula untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, maka salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan kemampuan profesional Pegawai Negeri melalui Pendidikan dan Pelatihan tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan pegawai negeri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan pegawai negeri secara keseluruhan. Pada dasarnya pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup.

Pendidikan dan Pelatihan pegawai negeri juga tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu sistem Pendidikan dan Pelatihan pegawai negeri tersebut juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II, pasal 4 ( 1994 : 4 ) sebagai berikut :

“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dalam Kepres No. 34 Tahun 1972 telah ditetapkan ruang lingkup tugas dan tanggung-jawab pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut :

- 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh, khususnya pendidikan umum dan kejuruan.
- 2) Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan dan pelatihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
- 3) Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung-jawab atas pembinaan pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai negeri

Dalam kaitannya dengan Pendidikan dan Pelatihan pegawai negeri, oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh. Tujuannya untuk meningkatkan mutu profesionalisme, pengabdian, kesetiaan dan pengembangan wawasan serta pembinaan karier pegawai negeri sipil.

Dalam PP 14 Tahun 1994 tersebut disebutkan bahwa tujuan dan sasaran dari pendidikan dan pelatihan adalah :

- a. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan pegawai negeri sipil kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- c. memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- d. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian pegawai negeri sipil.

Tujuan dan sasaran dari pendidikan dan pelatihan tersebut adalah agar tersedia pegawai negeri sipil yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu. Dengan demikian Diklat penjurangan yang dilaksanakan erat kaitannya dengan usaha penyiapan dan penyediaan serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Pendidikan dan Pelatihan diberikan peran yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pembangunan disegala bidang kehidupan bangsa. Sasaran khususnya adalah menyediakan tenaga-tenaga handal di jajaran birokrasi pegawai negeri sipil, khususnya eselon V dan IV.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak terpisah dari upaya untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penyiapan tenaga yang berkualitas untuk sasaran tersebut di atas harus disesuaikan dengan kualifikasi yang melekat pada tugas dan fungsinya sebagai pejabat eselon V dan IV. Hal ini penting agar hasil pendidikan dan pelatihan dapat diterapkan dan dapat meningkatkan efektifitas pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Pejabat eselon V dan IV merupakan pejabat level bawah yang langsung menangani pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, dan sekaligus juga sebagai penentu keberhasilan kebijakan dari lembaganya.

Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari para pembuat kebijaksanaan agar kecendrungan masyarakat yang menuntut pelayanan yang semakin berkualitas, profesional dan berkesinambungan dapat dipenuhi. Tuntutan tersebut kiranya dapat diantisipasi oleh lulusan Diklat Administrasi Umum (Adum) yang memiliki product utility yang sesuai. Diklat tersebut juga dipandang sebagai Diklat dasar untuk meniti karier dalam upaya mencapai peningkatan jenjang Diklat struktural yaitu ke tingkat SPAMA untuk eselon III, SPAMEN untuk eselon II, dan SPATI untuk eselon I.

Diklat Administrasi Umum dapat memberikan bekal kemampuan administrasi dasar sehingga para peserta mampu mengenali kedudukan organisasi dan peran instansi masing-masing dalam pemerintahan negara, serta mampu melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari secara efektif dan efisien.

Diklat Administrasi Umum yang selama ini dilaksanakan dipandang sangat urgent bagi kepentingan pemenuhan tuntutan akan mutu layanan yang semakin tinggi juga bagi perbaikan kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah mengemban tugas masing-masing.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Perhatian penulis pada penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan Product Utility lulusan Diklat Administrasi Umum (Adum) bagi pegawai negeri dilingkungan Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.

Dengan penelitian ini penulis akan mencoba mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan product utility lulusan Diklat Administrasi Umum

- a. Dengan adanya tuntutan pelayanan dari masyarakat yang semakin kritis, maka lulusan Diklat administrasi Umum dituntut pula untuk siap memanfaatkan hasil yang didapatkan dari Diklat tersebut.
- b. Para lulusan Diklat Administrasi Umum sampai saat ini dalam memanfaatkan hasil Diklat belum maksimal sesuai dengan job description pejabat eselon V dan IV.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan yang didapat dari Diklat Administrasi umum diharapkan dapat mengakomodasikan harapan-harapan yang telah diprogramkan oleh Departemen Agama, dalam hal ini Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis ( UPT ).



## **2. Rumusan Masalah**

Untuk menghindarkan penelitian yang meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah dimaksudkan agar ruang lingkup dalam pembahasannya nanti dapat terarah dan berhasil.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

**“ Bagaimana product utility lulusan Diklat Administrasi umum  
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ? “**

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut di atas maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran umum tentang penyelenggaraan Diklat Administrasi Umum, mulai dari koordinasi & kerjasama, landasan hukum, hal-hal yang dilakukan penyelenggara dan widyaiswara serta kinerja Balai Diklat PTK Bandung
- b. Apakah ada perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku product utility lulusan Diklat Administrasi Umum pada pekerjaan sesuai dengan tuntutan jabatan eselon V dan IV
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi product utility lulusan Diklat Administrasi Umum ?
- d. Bagaimana product utility dalam hal kinerja dan pelayanan, baik internal maupun eksternal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran empirik mengenai Product Utility lulusan Diklat Administrasi Umum dilihat dari kinerjanya.

Sasaran utamanya adalah, mengenali kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan dalam Product Utility, terutama dalam hal pemanfaatan hasil Diklat, agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dan pemantapan guna peningkatan sehingga lebih efektif sesuai kondisi dan situasi di lapangan

- b. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis alternatif langkah pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan yang dapat mengatasi hambatan dan kekurangan dalam Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (Adum) tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja eselon V dan IV.

### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus tujuan penelitian ini ditujukan untuk :

- a. Mengetahui gambaran umum proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Administrasi Umum (Adum) Departemen Agama yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Bandung.



b. Mengetahui product utility lulusan dalam bentuk pemanfaatan hasil Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Administrasi Umum (Adum) Departemen Agama Jawa Barat.

#### **D. Pentingnya Penelitian**

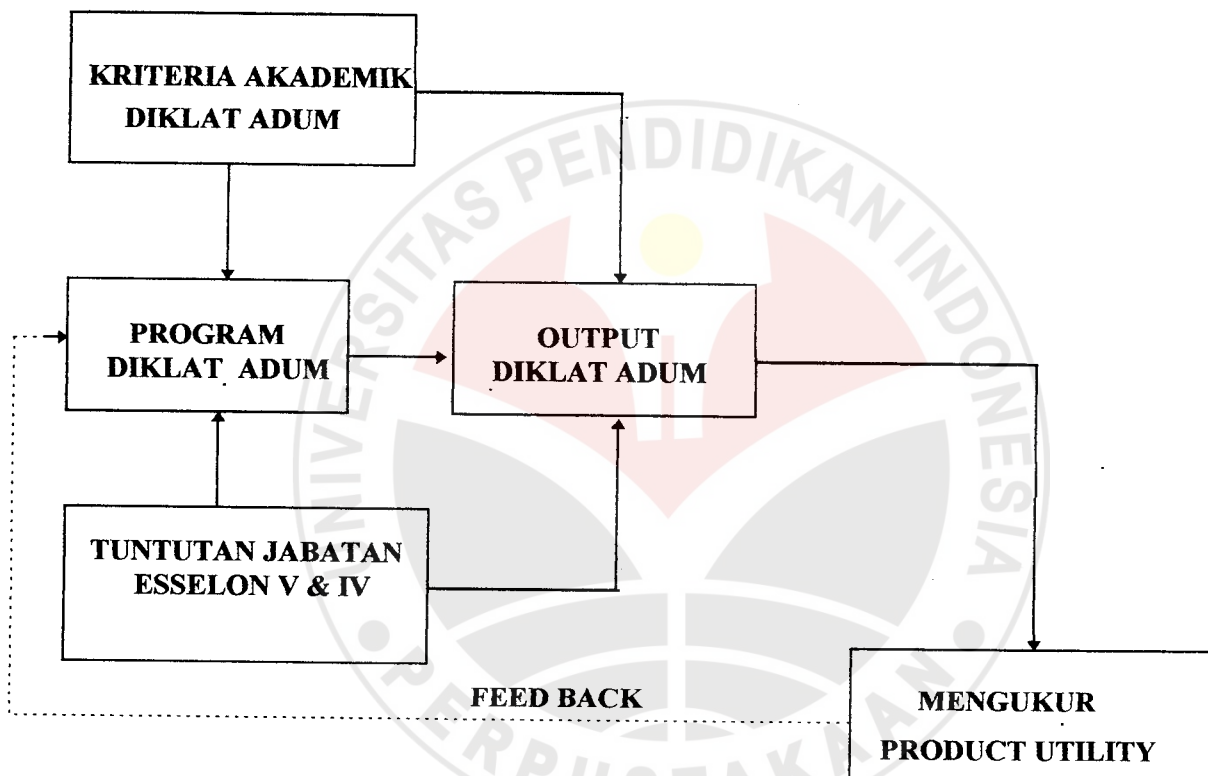
Pendidikan dan Pelatihan bagi para calon dan pejabat eselon V dan IV sangat diperlukan, agar pegawai yang bersangkutan cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.

Namun penelitian juga dirasa sangat penting untuk mengetahui product utility outputnya. Oleh karena itu penelitian ini akan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan dalam mengembangkan ilmu administrasi, terutama dalam mendidik dan melatih serta mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil para pejabat dan calon pejabat eselon V dan IV.

Apakah product utility lulusan Diklat Adum itu sudah memanfaatkan hasil Diklat atau belum, akan dicoba diteliti dalam penelitian ini. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan lulusan Diklat Administrasi Umum yang berada dilingkungan Departemen Agama Jawa Barat. Karena sepengetahuan penulis penelitian ini masih langka di negeri ini, maka diharapkan cara-cara dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sejenis, yaitu untuk mengetahui product utility lulusan dari lulusan Diklat Administrasi Umum

### E. Paradigma Penelitian

Pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan seperti telah diuraikan sebelumnya yang memberikan suatu gambaran bahwa Product Utility lulusan Diklat Administrasi Umum akan tinggi, apabila outputnya sesuai dengan kriteria akademik dan tuntutan jabatan eselon V dan IV tercapai, sehingga ada umpan balik antara product utility dengan program Diklat Adum yang merupakan kekuatan pengawasan atau pengendalian dan kegiatan sistem Diklat. Sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian tersebut di atas merupakan jalan pikiran yang ditempuh dalam penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Paradigma penelitian ini menggambarkan :

Bahwa upaya meningkatkan kemampuan para calon pejabat dan para pejabat eselon V dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Pendidikan dan Pelatihan. Hal demikian pula dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya.

Kemampuan dalam mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan tidak luput dari program pelaksanaan Diklat dengan peran panitia penyelenggara, peserta dan widyaiswara yang sekaligus menentukan keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan tersebut. Pendidikan dan Pelatihan merupakan satu persyaratan bagi pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi pejabat eselon V dan IV, hal ini berdasarkan PP 14 Tahun 1994.

Dengan demikian Pendidikan dan Pelatihan di Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Bandung yang selama ini dilaksanakan merupakan tugas yang terus menerus dilaksanakan, baik berupa Diklat Administrasi Umum Reguler maupun Diklat Administrasi Umum Crash Program yang masing-masing di danai oleh APBN maupun Swadana peserta.

Kriteria akademik yang menjadi dasar perencanaan pengajaran sebagai silabus dari pendidikan dan pelatihan Diklat Administrasi Umum baik Intra Kurikuler maupun Ekstra Kurikuler, menjadi bagian yang berada dalam keseluruhan kegiatan Diklat.

Sedangkan output (lulusan) Diklat Administrasi Umum yang menjadi harapan organisasi/Instansi pengirim, selanjutnya dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti Diklat Administrasi Umum.

Sebagai hasil dari Diklat Administrasi Umum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pejabat eselon V dan IV dalam melaksanakan tugas sesuai dengan job descriptionnya.

Kegunaan produk (product utility) dari sebuah organisasi (Diklat) akan berdampak positif terhadap pelaksanaan proses pekerjaan dilapangan.

Demikianlah paradigma penelitian yang penulis kemukakan sebagai gambaran untuk langkah penelitian berikutnya.

